



BPJS Nunggak Bayar RS Jogja Rp 16 M

■ Anggota dewan sebut potensi bangkrut,
tanpa APBD kas rumah sakit ngedrop

UMBULHARJO (MERAPI)- Keuangan dan operasional Rumah Sakit milik Pemkot Yogyakarta, RS Jogja terancam terganggu. Pasalnya ada tunggakan klaim BPJS Kesehatan sebanyak Rp 16 miliar yang belum dibayarkan ke RS Jogja. Untuk mengatasinya, operasional RS Jogja sementara ini dibantu dengan APBD Kota Yogyakarta.

"Kami sebetulnya masih ada Silpa. Tapi kalau tidak dibackup APBD, secara cash flow (arus kas) memang kami akan ngedrop sekali," kata Direktur Utama RS Jogja Ariyudi Yunita kepada wartawan, Kamis (1/8).

Dia menyebut klaim BPJS Rp 16 miliar itu untuk bulan Maret-April belum dibayarkan karena saat itu status quo RS Jogja yang belum terakredi-

tasi. Akreditasi RS Jogja baru dilaksanakan pada 8-11 Mei dan diumumkan pada 15 Mei 2019. Sementara untuk klaim bulan Mei sudah diajukan, tapi lanjutnya, BPJS menyatakan jatuh tempo RS Jogja pada 10 Juli. Sedangkan BPJS Jogja baru membayar klaim bagi RS yang jatuh tempo 24 Juni.

* Bersambung ke halaman 9

BPJS

"Belum ada kepastian kapan pembayarannya tunggakan itu. Menunggu surat dari Kemenkes bagaimana. Harapan kami tetap bisa dibayarkan sehingga rumah sakit setidaknya ada dana," paparnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardianto menilai jika tunggakan BPJS Rp 16 miliar tidak segera diselesaikan, bisa mengganggu operasional rumah sakit dan berpotensi ke-

bangkrutan. Dia menuturkan dalam rapat bersama dengan eksekutif disampaikan, belum terbayarnya tagihan BPJS Maret-April 2019 karena harus menunggu keputusan akhir dari auditor Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan terkait status rumah sakit yang masih dalam proses akreditasi.

"Apakah BPJS boleh atau bisa membayar yang Rp 16 M itu atau tidak, atau seperti apa. Pertanyaan mendasarnya kalau

keputusan adalah secara hukum tidak boleh membayar lalu bagaimana kelangsungan RSUD Wirasaban (RS Jogja)," tanya Fokki.

Secara terpisah Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan Pemkot Yogyakarta sudah menganggarkan di APBD Perubahan 2019 untuk menopang operasional RS Jogja dan sudah disetujui bersama DPRD setempat. Namun pihaknya juga akan menanyakan ke

Sambungan halaman 1
BPJS Kesehatan terkait kejelasan kapan tunggakan klaim dibayarkan ke RS Jogja.

"Sekarang sudah dicover APBD. Kalau nanti sudah dibayarkan oleh BPJS, itu (backup dana operasional) akan dikembalikan. Kami juga minta RS Jogja membenahi diri terkait aturan rujukan BPJS mengatasi pasien di rumah sakit tipe B yang berkurang," ucap Haryadi. (Tri)-a

ONTRAN-ONTRAN TUNGGAKAN RP 16 MILIAR

1. Penyebab

BPJS diketahui menunggak pembayaran senilai Rp 16 miliar ke RS Jogja. Penyebabnya, RS Jogja masih berada dalam status quo karena tidak bisa menyelesaikan akreditasi pada Desember 2018. RS harus menunggu keputusan dari auditor Kejaksaan Agung dan BPK untuk memastikan apakah BPJS diperbolehkan membayarkan klaim atau tidak.

2. Kepastian Pembayaran

Belum bisa dipastikan kapan BPJS mau membayar tunggakan itu karena menunggu kepastian dari Kemenkes.

3. Dampak

Kondisi keuangan RS Jogja terganggu. Jika tak disokong APBD, kas RS Jogja terancam ngedrop alias menyusut drastis.

**APBD
6M**

4. Bantuan

Pemkot Yogyakarta menyuntikkan APBD ke RS Jogja. Jumlahnya Rp 6 miliar sesuai kebutuhan rumah sakit itu selama sebulan. Persetujuan bersama APBD perubahan sudah disampaikan ke Pemda DIY, tinggal menunggu hasil evaluasinya.

5. Pelayanan ke Masyarakat

Pelayanan dipastikan tak terganggu. Dengan bantuan APBD, kebutuhan obat dan gaji tenaga kerja di rumah sakit

6. Solusi Jangka Panjang

Diperlukan aturan agar pasien rujukan bisa ke RS Jogja secara langsung agar jumlah pasien di RS Jogja tidak berkurang.

FOTO: ISTIMEWA / GRAFIS - SIBHE

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. RSUD (RS Jogja) 2. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005